

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Sumber Lainnya

- Afifah, R. N., & Pratiwi, A. I. (2019). Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Malang Tahun 2014-2018. *Seminar Nasional Gabungan Bisnis & Sosial Polinema*, 223.
- Brotodiharjo, R. S. (1993). *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (3 ed.). Bandung: Eresco.
- Erwis, N. A. (2012). Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan. *Skripsi Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Hasanuddin*, 6.
- Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi COVID-19. *Journal of Business & Entrepreneurship Universitas Muhammadiyah Jakarta*, 87-88.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Nazir, M. (2013). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Pekei, B. (2016). *Konsep dan Analisis Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi*. Jakarta Pusat: Taushia.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan Teori & Kasus* (11 ed., Vol. 1). Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suhartono, R., & Wirawan, I. B. (2010). *Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, T. (2017). *Perpajakan Indonesia : Pedoman Perpajakan Yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru*. Jakarta: Indeks.
- Sunyoto, D. (2013). *Metode Penelitian Akuntansi*. Bandung: PT Refika Aditama Anggota Ikapi.
- Tunas, D. S. (2013). Efektivitas Penagihan Tunggakan Pajak Dengan Menggunakan Surat Paksa Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado. *Jurnal EMBA Universitas Sam Ratulangi Manado*, 1528.
- Waluyo. (2007). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Situs Web

Badan Pusat Statistik. (2021, Februari 5). *Ekonomi Indonesia 2020 Turun sebesar 2,07 Persen (c-to-c)*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/02/05/1811/ekonomi-indonesia-2020-turun-sebesar-2-07-persen--c-to-c-.html>

Badan Pusat Statistik. (2021, Mei 5). *Ekonomi Indonesia Triwulan I-2021 turun 0,74 persen (y-on-y)*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/05/05/1812/ekonomi-indonesia-triwulan-i-2021-turun-0-74-persen--y-on-y-.html>

Badan Pusat Statistik. (2021, Agustus 5). *Ekonomi Indonesia Triwulan II 2021 Tumbuh 7,07 Persen (y-on-y)*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/08/05/1813/ekonomi-indonesia-triwulan-ii-2021-tumbuh-7-07-persen--y-on-y-.html>

Badan Pusat Statistik. (2021, November 5). *Ekonomi Indonesia Triwulan III 2021 Tumbuh 3,51 Persen (y-on-y)*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/11/05/1814/ekonomi-indonesia-triwulan-iii-2021-tumbuh-3-51-persen--y-on-y-.html>

Direktorat Jenderal Pajak. (t.thn.). *Wajib pajak Aktif dan Wajib pajak Non Efektif*. Dipetik Mei 3, 2022, dari Direktorat Jenderal pajak: <https://www.pajak.go.id/id/wajib-pajak-aktif-dan-wajib-pajak-non-efektif>

Elvina, L. (2020, Maret 12). *WHO Tetapkan Wabah Virus Corona Sebagai Pandemi Global*. Diambil kembali dari KompasTV: <https://www.kompas.tv/article/70893/who-tetapkan-wabah-virus-corona-sebagai-pandemi-global>

Kementerian Keuangan. (2021). *APBN 2020*. Diambil kembali dari Kementerian Keuangan: <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2020>

Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M. S. (2011, Juni 10). *Metode Pengumpulan Data Penelitian Kuantitatif*. Diambil kembali dari UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG: <https://www.uin-malang.ac.id/r/110601/metode-pengumpulan-data-penelitian-kualitatif.html>

Dokumen Publik dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang *Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997*.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2020.*

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 189/PMK.03/2020 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar.*

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang *Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus Disease 2019 (COVID-19).*